

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI

Dewi Megasari *)

Alumni FE. UPN “Veteran” Yogyakarta
Jalan Kayutaman, Rt 03/06, Pengkol Jepara, Jawa Tengah;
Email: dewi.megasari@ymail.com

Sri Wahyuni W.

UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

This study aimed to observe the effect of the implementation of corporate governance disclosure. Implementation of corporate governance and disclosure are two subjects that can protect investors from the asymmetry of information. The sampling method used is purposive sampling from the population selected by certain criteria, ie firms that enter in by IICG peringkat of the year 2005-2007. Data analyzed by multiple regression. The study concluded that corporate governance can significantly affect a company's level of disclosure. Companies with high corporate governance index will reveal better information in the financial statements of the company. Similarly, on the contrary, companies that provide high-disclosure in the financial statements will show that the implementation of Corporate Governance in the company, the better.

Keywords: : Corporate Governance and Disclosure.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan yang dikelola dengan baik (*Good Corporate Governance*) mempunyai ciri diantaranya menyampaikan informasi dengan lebih cepat, akurat, dan lengkap (Arifin, 2003). Suatu informasi dianggap informatif jika informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan (*beliefs*) para pengambil keputusan. Adanya suatu informasi yang baru akan membentuk kepercayaan yang baru dikalangan para investor. Beberapa informasi yang terdapat dipasar modal misalnya: penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*), pemecahan saham (*stock split*), pembagian dividen saham (*stock dividen*), laporan keuangan, dan yang baru-baru ini sedang marak diperbincangkan adalah *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Keasy (1993) yang dikutip Almilila & Lailul L. Sifa (2006) menyatakan bahwa *corporate*

governance merupakan sebuah struktur, proses, budaya, dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak kewajiban mereka”.

Tujuan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan.

Corporate Governance Perception Index (CGPI) yaitu pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan majalah SWA dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) berdasarkan tujuh kriteria. Kemudian di tahun berikutnya, diberikan penghargaan berupa *CGPI Award* kepada perusahaan-perusahaan yang

termasuk dalam pemeringkatan CGPI tersebut. *CGPI Award* adalah bentuk apresiasi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan terpercaya yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan dengan baik sesuai indeks yang telah disusun dapat menjadi motivator bagi perusahaan lain sekaligus sebagai indikator (*benchmark*) dalam menilai *corporate governance* di Indonesia. Almilia & Lailuli (2006) menyatakan apabila *good corporate governance* tercapai, maka kinerja saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat.

Penelitian mengenai *corporate governance* diantaranya dilakukan oleh Khomsiyah (2003) penelitian ini menggunakan metoda *two stage least square* (2SLS) karena metoda ini akan memberikan estimator yang efisien dan konsisten (Gujarati, 1995). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara implementasi *corporate governance* dengan tingkat pengungkapan, penelitian ini memberikan bukti adanya hubungan tersebut. Perusahaan yang mempunyai regulasi yang tinggi mempunyai indeks *corporate governance* yang lebih baik. Ukuran perusahaan yang diprediksi akan mempengaruhi implementasi *corporate governance* tidak mampu dibuktikan dalam penelitian ini. Sesuai yang diprediksi, struktur kepemilikan oleh masyarakat berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Kenyataan ini sesuai dengan analisis Susanto (1992), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat yang tinggi, cenderung untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak. Namun penelitian ini tidak mampu memberikan dukungan adanya pengaruh komposisi komisaris Independen dan keberadaan komite audit terhadap luas pengungkapan informasi.

Pada penelitian Lang dan Lundholm (1993) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi yang tinggi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki korelasi *earning-return* yang rendah. Lang dan Lundholm (1996) menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak akan diikuti oleh analisis yang lebih besar,

tingkat akurasi *forecast* yang lebih baik, dispersi *forecast* yang lebih kecil antar analisis individual, dan mempunyai volatilitas revisi *forecast* yang lebih kecil. Dispersi dan volatilitas *forecast* analisis menunjukkan suatu pengukuran yang valid bagi asimetri informasi. Dengan demikian, hasil penelitian Lang dan Lundholm (1996) tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pengungkapan yang lebih informatif akan mengurangi asimetri informasi.

Penelitian Ho dan Wong (2000) menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand, dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura, dan Taiwan). Hal ini diperkuat oleh Tsui dan Gul (2000) yang menyatakan bahwa Hongkong mengalami *shock* yang lebih rendah dibandingkan pasar modal negara Asean lainnya. Mekanisme *corporate governance* sudah dijalankan dengan baik di Hongkong, dengan demikian pengungkapan dan keterbukaan keuangan lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya di Asia. Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* di Indonesia masih rendah, demikian juga dengan kualitas informasi yang tersedia. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan pengungkapan informasi.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Ho dan Wong (2000) dan Sabeni (2002), dalam hal :

1. Pengukuran *Corporate Governance*

Ho dan Wong (2000), menggunakan pengukuran *Corporate Governance* dengan menggunakan empat atribut yaitu: proporsi komisaris independen terhadap jumlah total

komisaris, keberadaan komite audit, keberadaan individu yang dominan (CEO)/*Chairman duality*), dan prosentase anggota keluarga dalam komisaris. Sedangkan Sabeni (2002), menggunakan atribut komposisi dewan komisaris independen dan komite audit. Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan indeks dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2005, 2006 dan 2007.

2. Pengukuran Pengungkapan Informasi

Ho dan Wong (2000) dan Sabeni (2002) menggunakan luas pengungkapan sukarela sebagai pengukuran pengungkapan informasi. Penelitian ini menggunakan pengukuran pengungkapan informasi wajib yang ditentukan oleh Bappepam (Fitriany, 2001) dan luas pengungkapan sukarela sebagaimana yang digunakan oleh Fitriany (2001) dan Sabeni (2002).

3. Sampel

Ho dan Wong (2000) meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Hongkong Stock Exchange. Sabeni (2002) meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sampai dengan tahun 1999. Penelitian ini menggunakan sampel seperti halnya yang dilakukan oleh Sabeni, yaitu perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, namun dengan menggunakan data yang lebih baru yaitu laporan tahunan perusahaan tahun 2005, 2006 dan 2007.

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara teoritis, penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh para dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Meningkatnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan GCG yang baik dianggap mampu memberikan perlindungan efektif

terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar.

Pengukuran penerapan GCG oleh perusahaan dapat diproksi dengan beberapa indikator diantaranya indeks *corporate governance*, regulasi, struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan.

Indeks *corporate governance* merupakan hasil pemeringkatan atas penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Regulasi merupakan aturan yang menspesifikasikan rincian dan pedoman yang harus diikuti berkaitan dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti keseragaman, efisiensi, kendali, etika, dan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder (www.cic-fcgi.org), Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk mengingatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

3. PENGUNGKAPAN

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir

dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Disclousure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statement, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyediakan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005).

4. ASIMETRI INFORMASI (INFORMATION ASYMETRY)

Asimetri informasi (*Information Asymetry*) yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan peolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak

dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwaperusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha : Terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi.

5. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam pemeriksaan atau survey *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) pada tahun 2005-2007, sedangkan sampel penelitian adalah perusahaan yang memiliki peringkat setiap tahunnya. Dimana dari 80 pengamatan yang dilakukan 69 diantaranya memenuhi kriteria dan 11 lainnya gugur karena data tiak lengkap.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan mnggunakan alat statisti regresi berganda dengan 1 variabel tidak bebas (Y) dan 6 variabel bebas (X).

Menghitung variabel dependen, yaitu mengukur tingkat indeks pengungkapan (IP). Dalam menentukan indeks pengungkapan digunakan teknik tabulasi berdasarkan daftar pengungkapan. Penentuan skor pengungkapan bersifat dikotomi dimana item pengungkapan diberi skor satu (1) jika diungkapkan dan nol (0) jika tidak diungkapkan.

$$IP = n/k$$

Dimana:

IP : Indeks Pengungkapan

n : Jumlah item yang diungkapkan

k : Jumlah item yang mungkin diungkapkan

Setelah menghitung variabel independen, maka yang digunakan dalam penelitian ini berikutnya adalah secara deskriptif dan pengujian inferensial menggunakan SPSS yaitu dengan menggunakan alat statistic regresi linear berganda dengan satu variabel tidak bebas (Y) dan enam variabel bebas (X). alat analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tida bebas, baik secara bersama-sama maupun parsial.

Berdasarkan hal tersebut, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$Y = \alpha + b_1ICG + b_2REG + b_3SK + b_4DK + b_5KA + b_6Size + e$$

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Governance Perception Index adalah hasil pemeringkatan atas penerapan *corporate governance* atau survey implementasi *corporate governance* pada perusahaan publik yang tercatat di BEI, yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Hasil dari penyaringan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang mendapat CGPI Award	80
Perusahaan yang tidak sesuai kriteria	11
Jumlah sampel perusahaan CGPI	69

Dari hasil pemilihan sampel sesuai dengan criteria yang ditentukan, diperoleh jumlah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 perusahaan.

Atas seluruh data di atas, dilakukan pengujian statistik yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	SD
ICG	69	55,06	99,64	76,9383	9,32393
SK	69	5,98	99,12	63,1245	17,40736
DK	69	2	8	4,30	1,343
Size	69	6,44	21,49	16,5552	2,55443
IP	69	0,190	0,470	0,39362	0,077402

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan rata-rata Indeks *Corporate Governace* sebesar 76,9383, nilai minimum sebesar 55,06, nilai maksimum sebesar 99,64, dengan standar deviasi sebesar 9,32393 dengan jumlah observasi (n) sebesar 69. Rata-rata Struktur Kepemilikan sebesar 63,1245, nilai minimum sebesar 5,98, nilai maksimum sebesar 99,12, dengan standar deviasi sebesar 17,40736 dengan jumlah observasi (n) sebesar 69 ini menunjukkan kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan memiliki rata-rata 63,12% itu artinya rata-rata perusahaan perusahaan memiliki persentase kepemilikan institusional yang cukup besar, karena rata-ratanya di atas 50%. Rata-rata Komposisi Dewan Komisaris sebesar 4,30, nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 8, dengan standar deviasi sebesar 1,343 dengan jumlah observasi (n) sebesar 69 hal ini berarti struktur dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak terlalu besar (di bawah 50%). Rata-rata *Size* sebesar 16,5552, nilai minimum sebesar 6,44, nilai maksimum sebesar 21,49, dengan standar deviasi sebesar 2,55443 dengan jumlah observasi (n) sebesar 69. Rata-rata Indeks Pengungkapan sebesar 0,39362, nilai minimum sebesar 0,190, nilai maksimum sebesar 0,470, dengan standar deviasi sebesar 0,077402 dengan jumlah observasi (n) sebesar 69.

Hasil pengujian asumsi klasik multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi problem multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 yang berarti korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Gujarati, 2003).

Hasil asumsi klasik heterokedstisitas dilakukan dengan uji *glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:73).

Hasil pengujian asumsi klasik autokorelasi dilakukan dengan menggunakan besaran Durbin-Watson (D-W). Nilai D-W sebesar 2,173 hasil tersebut memenuhi kriteria D-W yang terletak antara batas atas (du) adalah 1,78 dan besar (4-du) adalah 2,22. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi problem autokorelasi.

Tabel 4.
Nilai R, R Square, SEE untuk Pengujian Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,392 ^a	,154	,023	,04914

a. Predictors: (Constant), Sz, ICG, REG, KA, DK, SK

b. Dependent Variable: ABS_RESS

Tabel 5.
F Test dan Signifikansi untuk Pengujian Hipotesis

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,017	6	,003	1,179	,337 ^a
	Residual	,094	39	,002		
	Total	,111	45			

a. Predictors: (Constant), Sz, ICG, REG, KA, DK, SK

b. Dependent Variable: ABS_RESS

Tabel 6.
Konstanta, Koefisien regresi, T Test, dan signifikansi untuk pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,197	,194		1,014	,317
	ICG	-,001	,001	-,188	-,877	,386
	REG	,020	,032	,165	,612	,544
	SK	,003	,003	,955	1,125	,267
	DK	-,037	,019	-1,005	-1,945	,059
	KA	,016	,038	,122	,419	,677
	Sz	-,006	,019	-,279	-,313	,756

a. Dependent Variable: ABS_RESS

struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan *size* terhadap indeks pengungkapan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) secara simultan *Indeks Corporate Governance*, Regulasi, Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit, dan *Size* berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pengungkapan. 2) secara parsial *Indeks Corporate Governance*, Regulasi, Struktur Kepemilikan, Keberadaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pengungkapan. Sedangkan Komposisi Dewan Komisaris dan *Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pengungkapan.

Berkaitan dengan variabel indeks pengungkapan dapat diberikan saran bagi perusahaan di dalam menjalankan usahanya, perusahaan hendaknya selalu memperhatikan aspek fundamental perusahaan terutama yang menyangkut kelengkapan pengungkapan, karena aspek ini selain memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan yang akan berimplikasi terhadap naiknya indeks pengungkapan perusahaan.

Dapat diberikan saran bagi investor, berkaitan dengan *Indeks Corporate Governance*, Regulasi, Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit, *Size* dan indeks pengungkapan perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat laba atas investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut.

Keterbatasan penelitian ini rentang waktunya terbatas, maka penggunaan rentang waktu penelitian selanjutnya yang lebih panjang, sehingga dihasilkan kesimpulan yang lebih valid. Penelitian ini hanya meneliti dengan objek perusahaan GCG, untuk peneliti selanjutnya disarankan meneliti perusahaan yang tergolong dalam kelompok LQ45 (perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang profitabilitas, kinerja perusahaan dan keuangannya dianggap baik). Tahun penelitian juga perlu ditambah supaya hasil estimasi dan

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan peneitian pengaruh penerapan *good corporate governance*, regulasi,

hasil penelitian lebih *representatif* (mewakili hasil regresi sebenarnya atau sesuai dengan dugaan dalam hipotesis) dan hasil estimasi tidak bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica dan Lailul L. Sifa. 2006. *"Reaksi Pasar Publikasi Corporate Governance Perception Index pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta"*. Simposium Nasional Akuntansi IX. 23-26 Agustus 2006, Padang. Hal. 1-24.
- Arifin, Sabeni. 2002. "An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director's Composition an the level of Voluntary Disclosure", *Proceedings For The Fifth Indonesian Conference On Accounting*, No. 5: 46-57.
- Arifin, Zaenal. 2003. *"Pengaruh Corporate Governance Terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Earning"*. Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003, Surabaya. Hal. 614-621.
- Gujarati, Damodar N. 1995. *"Basic Econometrics"*. Third Edition. McGraw-Hill.
- Fitriany, Nur Agus. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Hlm 133-154
- Jogiyanto. 2004. *"Metodologi Penelitian Bisnis"*. Edisi 2004/2005. Yogyakarta: BPFE.
- Khomsiyah, 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Simultan. Makalah SNA VI.
- Ho dan Wong, 2000. *Marketing and Advertising Professional*, The Chinese University of Hong Kong; Hong Kong Politecnic
- OECD. 1999. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Lang dan Lundholm, 1993, Cross-Sectional of Analysis Rating of Corporate Disclosure, *Journal Of Accounting Research*, 31: 246-271
- Scott, William R. 2000. *"Financial Accounting Theory"*. USA: Pretice-Hall.
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta
- Tsui & Gul, 2000. Tsui, J. and Gul, F.A. (2000) Corporate Governance and Financial Transparencies in the Hong Kong - Special Administrative Region of The People's Republic of China. *Proceedings of the 2nd Asian Roundtable on Corporate Governance*, Retrieved on March 25, 2004, from: <http://www.oecd.org/dataoecd/57/58/33919929.pdf>
- <http://www.cic-fcgi.org/>
- <http://www.iicg.org/>
- <http://www.fcgi.co.id/>
- <http://www.madani-ri.com/>